

REFLEKSI NILAI ADAT DAN IDENTITAS TRADISI MAPPASIKARAWA PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

Ahmad^{1*}, Ahmad Yani²

^{1,2} IAIN Parepare

Email: ahmad@iainpare.ac.id, ahmadyani01@iainpare.ac.id

*Nomor Hp/WA 0895806634925

ABSTRACT

Keywords:

Cultural semiotics;
ethnopedagogy;
Mappasikarawa; cultural
resilience; collective
identity.

This study offers a novel contribution to the fields of cultural studies and communication by integrating cultural semiotics analysis with an ethnopedagogical perspective to examine the Mappasikarawa tradition in a holistic manner—not merely as a ceremonial ritual, but as a symbolic communication system that embodies the construction of collective identity within South Sulawesi society. Unlike previous research, which has generally approached Bugis-Makassar marriage traditions from the standpoint of customary law or purely ethnographic description, this study specifically investigates how the customary values embedded in gestures, ritual sequences, and the meaning of the first touch (Mappasikarawa) function as a medium for transmitting cultural identity across generations amid the currents of modernization and contemporary social change. Social facts reveal that, in the era of digitalization, an anomaly has emerged in which communal traditions are frequently reduced to visual commodities, thereby risking the disconnection of the younger generation from their philosophical roots. Employing a qualitative approach that combines communication ethnography, cultural semiotics analysis (drawing on the theories of Charles Sanders Peirce and Yuri Lotman), and symbolic interactionism (George Herbert Mead), this research finds that the Mappasikarawa gestures contain informal cultural pedagogy that transmits the doctrines of *siri' na pacce*, *lempu'*, and *getteng*. The nonverbal signs within this ritual operate within a semiosphere that unites the sacred and profane realms, while intelligently dialectically integrating Islamic law (*'urf shahih* and *maqashid al-syariah*) with local wisdom. The study's conclusions yield a fresh understanding of cultural resilience among the indigenous communities of South Sulawesi in preserving their identity, while positioning Mappasikarawa as an essential instrument of multicultural education that is vital in responding to the challenges of globalization.

Kata Kunci:

semiotika budaya;
etnopedagogi;
mappasikarawa;
ketahanan budaya;
identitas kolektif.

ABSTRAK

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian budaya dan komunikasi dengan mengintegrasikan analisis semiotika budaya dan perspektif etnopedagogi untuk membedah tradisi Mappasikarawa secara holistik—tidak sekadar sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai sistem komunikasi simbolik yang memuat konstruksi identitas kolektif masyarakat Sulawesi Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji tradisi pernikahan Bugis-Makassar dari sudut pandang hukum adat atau deskripsi etnografis semata, penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana nilai-nilai adat yang terkandung dalam gestur, urutan ritual, dan makna sentuhan pertama (Mappasikarawa) berfungsi sebagai medium transmisi identitas budaya lintas generasi di tengah arus modernisasi dan pergeseran sosial kontemporer. Fakta sosial menunjukkan bahwa di era digitalisasi, terjadi anomali di mana tradisi komunal sering kali direduksi menjadi komoditas visual, sehingga berisiko mencabut generasi muda dari akar filosofisnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode etnografi komunikasi dan analisis semiotika budaya (merujuk pada teori Charles Sanders Peirce dan Yuri Lotman) serta interaksionisme simbolik (George Herbert Mead), penelitian ini menemukan bahwa gestur Mappasikarawa memuat pedagogi budaya informal yang mentransmisikan doktrin *siri' na pacce*, *lempu'*, dan *getteng*. Tanda-tanda nonverbal dalam ritual ini beroperasi di dalam sebuah semiosfer yang menyatukan ranah sakral dan profan, serta secara cerdas mendialektikkan hukum Islam (*'urf shahih* dan *maqashid al-syariah*) dengan kearifan lokal. Konklusi dari kajian ini menghasilkan pemahaman baru tentang ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat adat Sulawesi Selatan dalam mempertahankan jati dirinya, sekaligus memposisikan Mappasikarawa sebagai instrumen pendidikan multikultural yang esensial dalam merespons tantangan globalisasi.

Article History

Submitted: 8 Maret 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 25 Mei 2026

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



PENDAHULUAN

Di tengah pusaran arus globalisasi dan konvergensi teknologi digital yang kian masif, tatanan masyarakat komunal di berbagai belahan dunia, termasuk di lanskap kebudayaan Indonesia, dihadapkan pada sebuah tantangan eksistensial yang sangat serius (Swastiwi, 2024). Tantangan tersebut bermanifestasi dalam bentuk hegemonisasi kebudayaan global yang secara sistematis

berpotensi mendegradasi, memarginalkan, bahkan mengeliminasi eksistensi kearifan lokal yang telah berabad-abad menjadi pedoman hidup masyarakat adat (Kusno et al., 2012). Transformasi sosiokultural yang didorong oleh modernisasi dan penetrasi media massa sering kali membawa implikasi paradoksal; di satu sisi ia menawarkan efisiensi dan konektivitas, namun di sisi lain ia mengakibatkan pergeseran sistem nilai yang sangat tajam (Widodo & Permatasari, 2023). Praktik-praktik tradisi dan ritus-ritus kebudayaan yang sarat akan makna filosofis dan spiritual perlahan-lahan mulai direduksi, dikomodifikasi, dan didegradasi menjadi sekadar performativitas seremonial, tontonan eksotis, atau konten visual belaka yang kehilangan roh substansialnya (Wahyudi & Demang, 2025). Kondisi ini melahirkan kecemasan sosiologis mengenai potensi ketercerabutan identitas (*identity uprooting*) pada generasi muda yang tumbuh dalam kepungan nilai-nilai pragmatis dan materialistis, sehingga literasi terhadap ontologi kebudayaan lokal menjadi semakin dangkal (Ahida et al., 2025).

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya sub-etnis Bugis dan Makassar yang memiliki akar historis, maritim, dan peradaban yang sangat kuat, kebudayaan sama sekali bukan sekadar artefak masa lalu yang dibekukan di dalam etalase museum (Arifin, 2025). Sebaliknya, kebudayaan adalah sebuah pranata sosial yang hidup, bernapas, dan secara dinamis mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama (Saetban & Waang, 2019). Kebudayaan Bugis-Makassar dibangun di atas fondasi ontologis dan aksiologis yang teramat kokoh, yang terekam secara komprehensif dalam naskah-naskah kuno *Lontara*, dan termanifestasi secara nyata dalam falsafah hidup keseharian yang dijunjung tinggi secara kolektif. Falsafah tersebut merupakan agregat dari berbagai nilai luhur yang berfungsi sebagai kompas moral bagi setiap individu (*To Ugi'*) dalam melakukan navigasi sosial di tengah kompleksitas kehidupan.⁵ Dalam kosmologi kebudayaan yang demikian sentralistik inilah, institusi keluarga dan perkawinan menempati hierarki yang paling sakral.

Pernikahan, atau dalam terminologi lokal disebut *botting* (atau *pa'bungtingan/makkalaibineng*), dalam pandangan ontologis masyarakat Bugis-Makassar tidak pernah dipahami secara reduksionis hanya sebagai penyatuan dua entitas individu secara biologis, afektif, atau legal-formal belaka. Lebih dari itu, perkawinan adalah sebuah mekanisme sosio-kultural tingkat tinggi yang berfungsi merekatkan, menjahit, dan mengintegrasikan dua keluarga besar (*sompe'* atau *rumpun keluarga*) ke dalam sebuah jalinan kekerabatan baru yang mengikat secara moral, ekonomi, teologis, dan politik. Karena signifikansi dan bobot sosiologisnya yang begitu luar biasa, prosesi pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan senantiasa dilingkupi, dibentengi, dan dihiasi oleh rangkaian ritual adat yang sangat panjang, berlapis, kompleks, dan sarat akan muatan semiotik. Dimulai dari fase penjajakan (*mammanu-manu'*), pelamaran (*madduta*), pemberian uang naik (*dui' panaik*), malam pacar (*mappacci*), hingga puncak pengesahan agama berupa akad nikah (*ijab kabul*). Namun, dari keseluruhan epikentrum rangkaian prosesi tersebut, terdapat satu ritus transisional yang memegang peranan paling esensial dalam memvalidasi penyatuan fisik dan psikologis kedua mempelai, yakni tradisi *Mappasikarawa*.

Secara etimologis dan leksikal, istilah *Mappasikarawa* (atau dalam beberapa dialek disebut *Mappasiluka*) berasal dari bahasa Bugis yang bermakna "saling bersentuhan" atau "mempertemukan untuk disentuh". Ritual ini merupakan manifestasi dari sentuhan fisik pertama antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang secara sah dilakukan segera setelah prosesi *ijab kabul* (akad nikah) selesai dilaksanakan oleh pemuka agama (*kadhi* atau penghulu). Mappasikarawa menandai momentum transisi ontologis dan status yuridis-kultural mereka; bergeser dari entitas individu lajang yang terikat pada pantangan (*pamali*) bersentuhan, menjadi entitas pasangan suami istri yang telah dihalalkan secara syariat agama dan diakui secara adat untuk bersatu secara fisik.⁵ Pada detik ketika sentuhan ini terjadi, sebuah semesta makna yang baru terbuka, menandai dimulainya perpindahan tanggung jawab perwalian, otoritas perlindungan, serta perpaduan dua nasib dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Fakta literatur dan penelusuran historiografis menyingkapkan bahwa kajian akademis mengenai tradisi *Mappasikarawa* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi, telaah kritis terhadap diskursus yang berkembang menunjukkan adanya tendensi reduksionistik. Sebagian besar penelitian terdahulu umumnya mengkaji ritual ini secara eksklusif dari optik tinjauan hukum adat, mendeskripsikannya sekadar sebagai bagian dari tahapan etnografis upacara perkawinan tanpa membedah lebih dalam muatan filosofisnya. Di sisi lain, literatur-literatur yang berakar pada hukum keluarga Islam (Fikih Munakahat) sering kali memfokuskan analisisnya pada perdebatan normatif mengenai kompatibilitas praktik *Mappasikarawa* dengan postulat-postulat syariah murni, cenderung terjebak pada dikotomi halal-haram, dan mengukur sejauh mana adat tersebut dapat diakomodasi sebagai '*urf*' (kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan nas).¹⁶ Tinjauan-tinjauan hukum ini membedah *Mappasikarawa* semata-mata sebagai objek yurisprudensi kultural yang harus dijustifikasi keberadaannya.

Meskipun kajian-kajian lintas disiplin tersebut telah memberikan lanskap awal yang sangat berharga dan fondasi teoritis yang tidak dapat diabaikan, terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang teramat signifikan. Mayoritas studi terdahulu cenderung membedah *Mappasikarawa* secara makroskopis dan mekanistik, sehingga meluputkan dimensi mikroskopis dari gestur sentuhan tersebut sebagai sebuah arsitektur sistem tanda yang saling bertaut erat dengan mekanisme transmisi identitas, pembentukan karakter (*character building*), dan rekayasa sosiokultural. Belum ada elaborasi yang memadai mengenai bagaimana mikrokosmos dari sebuah sentuhan jari, dahi, atau dada mampu merepresentasikan makrokosmos nilai-nilai filsafat Bugis-Makassar secara utuh, dan bagaimana transmisi semiotis ini dioperasikan sebagai perangkat pedagogis di luar institusi pendidikan formal.

Beranjak dari kesadaran akan kekosongan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaharuan (*novelty*) yang fundamental dalam kajian budaya dan ilmu komunikasi. Penelitian ini mengintegrasikan analisis semiotika budaya dan perspektif etnopedagogi untuk membedah tradisi Mappasikarawa secara holistik tidak sekadar sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai sistem komunikasi simbolik yang memuat konstruksi identitas kolektif masyarakat Sulawesi Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji tradisi pernikahan Bugis-Makassar dari sudut pandang hukum adat atau deskripsi etnografis semata, penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana nilai-nilai adat yang terkandung dalam gestur,

urutan ritual, dan makna sentuhan pertama (Mappasikarawa) berfungsi sebagai medium transmisi identitas budaya lintas generasi di tengah arus modernisasi dan pergeseran sosial kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman baru tentang ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat adat Sulawesi Selatan dalam mempertahankan jati dirinya.

Untuk membongkar kompleksitas tersebut, penelitian ini meminjam dan mensintesis tiga pilar kerangka teori besar yang dioperasikan secara dialektis. Pertama, Teori Interaksionisme Simbolik dari sosiolog George Herbert Mead (khususnya konsep *Mind, Self, and Society*), yang digunakan untuk menelusuri bagaimana makna diri (*self*) kedua mempelai direkonstruksi dan divalidasi oleh masyarakat (*society*) melalui proses interaksi dan komunikasi gestural di bawah panduan pemangku adat. Kedua, Semiotika Budaya yang mengawinkan relasi triadik Charles Sanders Peirce (Representamen, Objek, Interpretant) untuk membedah anatomi tanda fisik dari setiap lokus sentuhan, dengan Teori Semiosfer dari pemikir Tartu-Moscow School, Yuri Lotman. Teori Lotman diaplikasikan secara spasial untuk membaca ruang kamar pengantin sebagai ekosistem semiotik tertutup yang secara otonom memproduksi, menerjemahkan, dan mendistribusikan makna kesakralan. Ketiga, perspektif Etnopedagogi digunakan sebagai bingkai pamungkas untuk menjelaskan fenomena transmisi nilai-nilai tersebut sebagai praksis pendidikan informal (*informal education*), literasi kultural, dan rekayasa penguatan karakter yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*).

Integrasi multidisipliner yang diajukan dalam rumusan masalah ini difokuskan untuk menjawab dan mengurai tiga klaster teka-teki akademis: (1) Bagaimana anatomi, struktur, dan kronik urutan ritual *Mappasikarawa* dikonstruksi secara performatif sebagai sistem gestur dan sentuhan di ruang transisional? (2) Bagaimana analisis semiotika budaya, melalui lensa Peirce dan Lotman, mengungkap rahasia makna filosofis yang terenkripsi di balik setiap gestur, pantangan, dan simbol dalam ritual tersebut? (3) Bagaimana nilai-nilai adat fundamental Bugis-Makassar—seperti *siri' na pacce*, *lempu'*, dan *getteng*—yang tertanam dalam *Mappasikarawa* berfungsi secara etnopedagogis dalam merekonstruksi identitas kolektif, mentransmisikan pendidikan lintas budaya, dan secara akumulatif memperkuat ketahanan budaya masyarakat Sulawesi Selatan di tengah badai modernisasi dan konvergensi digital? Melalui eksplorasi yang mendalam terhadap ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan warisan takbenda, melainkan juga untuk mereposisi kearifan lokal sebagai instrumen strategis yang memiliki daya lenting dalam merawat peradaban Nusantara.

METODOLOGI

Penelitian ini dikonstruksi di atas fondasi paradigma kualitatif dengan mengadopsi pendekatan etnografi komunikasi dan semiotika budaya. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan epistemologis bahwa objek material penelitian ini berwujud fenomena sosial, perilaku kultural (*cultural behavior*), dan sistem keyakinan simbolik yang sangat dinamis, sehingga menuntut kedalaman interpretasi (*verstehen*) serta upaya penggalian makna emik secara holistik dari sudut pandang masyarakat lokal sebagai pelaku sejarah kebudayaan tersebut.⁵ Pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk tidak berjarak dengan objek yang diteliti, melainkan secara langsung menginfiltrasi ruang lingkup kehidupan kultural masyarakat

Bugis-Makassar, mengamati dinamika praktik ritual secara mikroskopis, serta menangkap struktur makna laten yang memandu tindakan sosial komunitas komunal tersebut dalam setting naturalnya.

Korpus data dalam penelitian kualitatif ini diklasifikasikan menjadi dua kategori komplementer: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara ekstensif melalui serangkaian teknik observasi partisipatif (*participant observation*) yang dilakukan pada beberapa helatan upacara pernikahan adat Bugis-Makassar, baik yang berlokasi di pusat kebudayaan di Sulawesi Selatan (seperti Kabupaten Bone dan Soppeng) maupun pada entitas komunitas diaspora di wilayah lain (seperti Morowali Utara dan Sebatik). Dalam pelaksanaan observasi ini, atensi diarahkan secara saksama untuk merekam setiap detail gerakan, kronik gestur, vokalisasi doa atau mantra, mimik wajah, penataan spasial, serta interaksi simbolik yang termanifestasi pada fase pasca-akad nikah, khususnya di dalam ruang transisional kamar pengantin tempat *Mappasikarawa* bermuara.

Sebagai pelengkap instrumen observasi, pengumpulan data primer diperdalam melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang tidak terstruktur. Informan penelitian ditentukan melalui mekanisme *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria ketat yang merepresentasikan otoritas pengetahuan kultural. Kategori informan utama mencakup para *pappasikarawa* atau *ambe' botting* (tokoh adat, tetua, atau individu terpilih yang memiliki legitimasi moral untuk memandu jalannya ritual sentuhan), tokoh agama (ustaz dan *panrita* yang mengukur kompatibilitas syariat), budayawan lokal yang memahami literatur *Lontara*, serta pasangan suami istri dari berbagai lintas generasi (milenial dan generasi Z) yang telah melalui dan memaknai prosesi tersebut secara personal. Untuk mengonstruksi pemahaman teoretis yang solid, data sekunder digali secara sistematis dari naskah-naskah kuno, artikel jurnal ilmiah lintas disiplin yang terindeks SINTA, buku teks antropologi-etnografi, serta dokumen otoritatif lainnya yang mendiskusikan sistem kekerabatan dan ketahanan budaya masyarakat Bugis.

Alur pemrosesan dan teknik analisis data dilaksanakan dengan merujuk pada model analisis interaktif, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara teknis, data yang terkumpul dari lapangan dianalisis melalui tiga tahapan dekode semiotik: (a) identifikasi tanda fisik secara objektif (*denotasi*), (b) interpretasi dan ekstraksi makna kultural-filosofis (*konotasi*), dan (c) dekonstruksi atas mitos, nilai etnopedagogis, serta sinkretisasi hukum Islam yang terkandung di dalam jaringan simbol ritual.²⁸ Guna menjamin validitas dan reliabilitas interpretasi makna dalam kerangka kualitatif, keabsahan data diuji secara rigor melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta mekanisme *member checking*, di mana temuan awal dan draf interpretasi dikonfirmasi kembali kepada para *pappasikarawa* dan ahli budaya Bugis-Makassar untuk memastikan bahwa konstruksi teoretis yang dibangun oleh peneliti selaras dengan realitas emik masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembongkaran makna kultural dan nilai identitas dari tradisi *Mappasikarawa* tidak dapat dilakukan secara atomistik. Fenomena ini merupakan representasi dari jaring-jaring makna (*web of significance*) yang direkatkan oleh pertautan antara mitologi lokal, doktrin teologis, praksis pendidikan komunal, dan mekanisme pertahanan sosiologis. Hasil penelitian dan observasi mendalam menunjukkan bahwa ritus ini merupakan ekosistem budaya yang beroperasi pada lima pilar bahasan utama yang saling bersinggungan secara linier, sebagaimana yang diuraikan secara komprehensif pada sub-pembahasan berikut ini.

4.1 Anatomi dan Kronik Gestur dalam Performativitas Ritual Mappasikarawa

Pemahaman yang utuh terhadap esensi *Mappasikarawa* mensyaratkan dekonstruksi atas anatomi ritual secara runut, sistematis, dan kronologis, karena setiap fragmen tahapan, penataan spasial, serta pergerakan temporal dalam prosesi ini merupakan rajutan teks budaya yang kohesif. Berdasarkan pemetaan etnografis dan triangulasi wawancara dengan para pemangku adat (*pappasikarawa*), tradisi ini tidak berdiri secara soliter, melainkan selalu diposisikan sebagai klimaks dari serangkaian interaksi teaterikal yang dirancang khusus untuk memediasi pertemuan perdana tubuh maskulin dan feminin di bawah naungan norma agama dan panji adat. Ritual ini mengambil tempat di sebuah ruang spasial yang bersifat transisional; ia dilaksanakan tepat pasca-ritual *ijab kabul* (akad nikah), di mana secara hukum positif dan syariat Islam kedua mempelai telah sah berstatus sebagai suami istri, namun secara kacamata adat, mereka masih membutuhkan legitimasi kosmis dan persetujuan kultural untuk menyatu secara absolut dalam dimensi fisik.

Secara kronologis, performativitas anatomi ritual *Mappasikarawa* tersusun atas beberapa fase esensial, yang dapat dipetakan melalui matriks struktural tindakan budaya berikut ini:

Fase Ritual	Terminologi Lokal	Deskripsi Gestur dan Perilaku Simbolik	Makna Filosofis dan Muatan Kultural
Prafase (Gerbang Transisi)	Mappaenre Botting Urane & Pattimpa Tange' (Buka Pintu)	Mempelai pria (diantar tetua) menuju kamar pengantin wanita yang terkunci rapat. Pihak pria harus bernegosiasi dan menyerahkan materi (koin, permen, atau uang kertas) kepada penjaga pintu sebagai syarat mutlak agar akses masuk diberikan.	Simbolisasi benteng kehormatan keluarga wanita. Mempelai pria ditanamkan memori bawah sadar bahwa ia harus berjuang, berkorban, dan bersusah payah untuk "meraih" istrinya, sebagai jangkar psikologis agar ia tidak sewenang-wenang menceraikannya di masa depan.
Inti Ritual (Validasi Fisik)	Mappasikarawa (Sentuhan Simbolik Pertama)	Dipandu secara otoritatif oleh Pappasikarawa. Mempelai pria dituntun untuk menyentuhkan ibu jarinya atau bagian tubuh lain secara presisi ke tubuh mempelai wanita, diiringi internalisasi doa atau rapalan ayat suci Al-Qur'an.	Pembatalan wudu secara kultural yang menandai penyatuan energi maskulin-feminin. Titik awal serah-terima tanggung jawab perlindungan kemanusiaan dari keluarga asal kepada suami.
Afirmasi (Pengikatan)	Mappasiame' & Pemasangan	Mempelai pria menyalurkan cincin ke jemari sang istri.	Representasi ikatan melingkar yang tak terputus (<i>continuing bond</i>),

Komitmen)	Cincin	Keduanya kemudian didudukkan berdampingan secara intim di atas ranjang persandingan untuk pertama kalinya.	komitmen terhadap janji monogami, integrasi emosional, serta penegasan visual sebagai pasangan sah.
Kompetisi Simbolik (Dinamika Kuasa)	Malloangeng (Berdiri dan Menginjak Kaki)	Kedua mempelai diselimuti rapat oleh satu lembar sarung sutra (yang telah dijahit tiga kali lipatan benang emas). Mereka dikondisikan untuk berlomba berdiri secara cepat dan berusaha menginjak kaki pasangannya.	Mitologi masyarakat meyakini siapa yang menginjak lebih dahulu akan mendominasi bahtera rumah tangga. Secara filosofis, ini adalah manifestasi dari dorongan untuk segera bangkit menyongsong masa depan secara setara dan bahu-membahu (sibali perri).
Resolusi (Integrasi Sosial)	Mamatoa / Mapparola (Sungkeman)	Kedua mempelai keluar dari zona eksklusif kamar pengantin menuju ruang publik (ruang tamu) untuk bersujud (sungkem) dan menyalami orang tua serta segenap mertua, memohon rida dan doa restu berkelanjutan.	Rekonsiliasi sosial paripurna; peleburan dua garis silsilah keluarga besar yang berbeda (sompe') menjadi satu entitas kerabat yang solid tanpa polarisasi.

Dalam analisis yang lebih tajam, fase *Pattimpa Tange'* (membuka pintu) merupakan sebuah mekanisme kontrol sosial dan rekayasa arsitektur psikologis yang sangat cerdas. Ruang privat kamar pengantin (sering disebut *bilik* atau *lontik*) disimbolkan secara metonimi sebagai ruang kehormatan klan (keluarga wanita) yang kesuciannya harus senantiasa dipertahankan dari intervensi luar. Ketika pihak keluarga mempelai laki-laki diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah materi (uang logam, kertas, atau ornamen manis seperti gula-gula) untuk memperoleh akses, transaksi ini sama sekali tidak dikonstruksi dalam bingkai ekonomi atau komersialisasi tubuh wanita.¹³ Menurut dekonstruksi kultural yang dipaparkan oleh Sudirman (2019), praktik perbuatan (*gaukeng*) ini murni merupakan representasi dari upaya (*effort*) pengorbanan yang berdarah-darah.¹³ Tujuannya adalah menanamkan jejak neurologis kepada sang suami bahwa ia telah mendobrak benteng pertahanan keluarga istrinya melalui perjuangan diplomasi yang melelahkan. Dengan demikian, apabila di masa depan badai konflik domestik menerpa, ingatan kolektif akan sulitnya perjuangan di depan pintu kamar tersebut akan beroperasi sebagai jangkar psikologis yang mencegah sang suami untuk bertindak destruktif, bersikap semena-mena, atau mengucapkan talak perceraian dengan mudah.

Bergerak memasuki fase *Mappasikarawa* inti, peran individu yang disebut *Pappasikarawa* (atau *Ambe' Botting*) menjadi orbit penentu. Figur ini bukan sekadar bertindak sebagai *master of ceremony* atau pemandu ritual biasa, melainkan ia dikukuhkan sebagai figur representasi spiritual. Penunjukan seorang *Pappasikarawa* didasarkan pada rekam jejak moralitasnya yang nir-cela, kearifannya, serta rekam jejak keberhasilan rumah tangganya sendiri di masa lalu

(idealitasnya adalah tokoh yang belum pernah bercerai dan memiliki keturunan yang saleh). Meminjam kerangka konseptual Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead, *Pappasikarawa* bertindak sebagai personifikasi dari masyarakat (*generalized other/society*) yang mewakilkan kehadirannya secara absolut untuk memberikan validasi terhadap pergeseran konsep diri (*self*) kedua mempelai. Di ruang transisi ini, terjadi proses komputasi pikiran (*mind*) di mana setiap individu yang terlibat menerjemahkan simbol-simbol sentuhan nonverbal tersebut menjadi ekspektasi masa depan. Makna ritual ini tidak berdiri di ruang hampa, ia menjadi otentik dan sempurna tatkala terjadi resonansi pemahaman yang holistik antara aktor yang disentuh (mempelai), aktor yang memandu (*Pappasikarawa*), dan audiens yang memberi persetujuan moral (keluarga).

Pasca-sentuhan dilakukan, ritual dikunci melalui prosesi *Malloangeng* yang menampilkan perpaduan unik antara kesakralan kultural dan dinamika perebutan relasi kuasa. Kedua tubuh mempelai yang baru saja dihalalkan itu direngkuh, dililit, dan dipersatukan secara paksa di dalam satu sarung sutra agung. Lilitan sarung yang hangat ini merupakan metafora dari rahim kehidupan baru yang akan menaungi mereka. Di dalam selimut sarung tersebut, lomba berdiri dan saling menginjak kaki merepresentasikan sebuah kecemasan primordial mengenai siapa sosok yang kelak akan memegang hegemoni dominasi dalam hierarki pernikahan.¹³ Walau narasi mitologis yang dikonsumsi masyarakat awam kerap menyatakan bahwa siapa pemenang yang lebih dulu menginjak kaki lawannya akan menduduki tampuk kekuasaan absolut (*patriarki* atau *matriarki* terselubung), kritik sosiologis modern memberikan penafsiran sebaliknya. Analisis kultural kontemporer menegaskan bahwa *Malloangeng* sejatinya sedang menanti proses revitalisasi pemaknaan agar kembali pada esensi purbanya: bukan ditujukan untuk mengkanonisasi supremasi kekuasaan tunggal, melainkan sebuah demonstrasi kompetisi afektif untuk segera bangkit secara paralel, melangkah bersama, dan menopang beban berat kehidupan secara adil, yang dalam diksi Bugis disebut sebagai prinsip *sibali perri'* (saling mendukung dan menanggung duka bersama).

4.2 Semiotika Budaya: Signifikasi Anatomi Sentuhan dan Operasi Ruang Semiosfer

Pendekatan Semiotika Budaya memberikan pisau bedah yang presisi untuk membongkar teka-teki enkripsi pada setiap pergerakan dalam *Mappasikarawa*. Dengan menggunakan paradigma semiotika Charles Sanders Peirce, *Mappasikarawa* dapat didekonstruksi melalui relasi triadik: *Representamen* (bentuk fisik tanda yang dapat diindera, berupa titik lokus anatomi dan cara sentuhan itu dilakukan), *Objek* (referen idealitas, yakni kondisi rumah tangga yang diamankan), dan *Interpretant* (respons kognitif dan afektif komunal masyarakat Bugis terhadap perpaduan tanda tersebut). Di atas kanvas ritual ini, tubuh manusia mengalami dekomodifikasi; ia tidak lagi direduksi sebagai sekadar entitas biologis yang terdiri dari daging dan tulang, melainkan disublimasikan sebagai kanvas semiotik tempat doa, kutukan, dan harapan kolektif dituliskan. Mempelai laki-laki diposisikan secara aktif sebagai proyektor (subjek pentransmisi amanah), sedangkan berbagai titik anatomi tubuh mempelai wanita difungsikan sebagai reseptor (objek penerima pesan-pesan suci).

Meskipun signifikasi pemaknaan dari setiap titik gestur sentuhan dalam tradisi ini memiliki variabilitas dan perbedaan penafsiran mikroskopis bergantung pada lanskap geografis komunitas dan aliran mazhab sang *Pappasikarawa*, muara teleologis dari seluruh makna tersebut tetaplah bermuara pada satu titik konstan: ekuilibrium keluarga. Secara lebih analitis,

dekonstruksi semiotika sentuhan fisik dalam *Mappasikarawa* mencakup topografi anatomi berikut:

Anatomi Sentuhan (Representamen)	Mekanisme Gestural dan Teks Penyerta	Makna Filosofis Simbolik (Interpretant dan Objek)
Ibu Jari Tangan (Tafahum / Ketundukan Ego)	Ibu jari kanan kedua mempelai dipertemukan dan dijepit oleh pemandu. Keduanya diinstruksikan secara tegas untuk melemaskan otot ibu jari dan menekan hasrat ego untuk mendominasi. Sering diiringi doa untuk mencari "air kehidupan".	Simbol peredaman ego dan supremasi. Sentuhan ini mentransmisikan pesan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga (domestic dispute) harus didasarkan pada kelenturan ego, tafahum (saling memahami secara empatik), kelembutan nurani, dan kerelaan untuk saling memaafkan, bukan dengan agresi.
Dahi / Samping Kening (Titik Spiritualitas)	Ibu jari mempelai pria disentuh secara halus ke arah pelipis, dahi, atau sekitar pangkal telinga kiri mempelai wanita. Disertai resitasi puitis QS. Ali Imran: 31 (Qul in kuntum tuhibbunallah).	Dahi adalah puncak tertinggi arsitektur manusia, pusat rasionalitas dan mahkota spiritualitas. Menyentuhnya berarti menitipkan doa obyektif agar rumah tangga senantiasa diterangi kebahagiaan, kedamaian pemikiran (peace of mind), dan tuntunan agar suami selalu menahkodai istri menggunakan kecerdasan akal budi.
Bahu Atas (Sossoreenna) dan Dada (Titik Afeksi & Rezeki)	Tangan mempelai pria menyentuh area lengan atas, bahu, atau didekatkan ke wilayah dada pengantin wanita.	Lengan/bahu adalah organ kinetik simbol kekuatan dan etos kerja. Sentuhannya adalah pengharapan agar keluarga ini senantiasa dikaruniai kelimpahan rezeki dan kemudahan dalam berbagi beban finansial. Dada adalah episentrum emosional; sentuhannya bertujuan menyelaraskan vibrasi batin, empati tanpa batas, dan kelapangan dada meredam badai.
Ubun-ubun dan Leher Bawah (Zona Tabu / Pamali)	Area ini secara absolut dihindari dan diharamkan untuk disentuh pada momentum Mappasikarawa pertama kali.	Interpretant budaya memitoskan kedua rongga atau lekukan ini sebagai visualisasi dari liang lahat (kuburan). Dalam sistem Peirce, ketidakhadiran tanda (penghindaran) adalah indeks kematian. Menyentuhnya dipercaya memicu kemalangan kosmis, disfungsi umur, dan kematian dini.

Untuk merangkai keseluruhan kepingan tanda-tanda sporadis dan spesifik tersebut ke dalam satu ekologi pemaknaan yang padu, perspektif *Semiosfer* dari teoritikus budaya Rusia, Yuri Lotman, menghadirkan daya analitis yang amat koheren. *Semiosfer* didefinisikan sebagai ruang

semiotik maya yang berada di luar jangkauan strukturalisme bahasa linguistik konvensional, di mana sebuah entitas kebudayaan dapat beroperasi selayaknya organisme biologis yang memiliki kemampuan untuk secara mandiri mereproduksi, bernapas, dan menegosiasikan maknanya. Dalam kerangka ini, ruangan kamar pengantin dan durasi temporal saat momen *Mappasikarawa* dieksekusi beroperasi sebagai sebuah "pusat semiosfer" (*the core of semiosphere*) yang tertutup. Pintu kamar yang terkunci—sebagaimana dibahas pada fase *Pattimpa Tange'*—berfungsi secara harfiah sebagai "batas semiotik" (*semiotic boundary*) mutlak yang memisahkan dan memfiltrasi dunia luar (yakni ruang publik yang bising, kacau, dan bersifat profan) dengan dunia dalam (ruang domestik perkawinan yang intim, sunyi, dan maha sakral).

Pappasikarawa dalam teori Lotman berfungsi sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan kebudayaan atau "filter penerjemah" mekanistik. Ia bertanggung jawab mendistilasi dan mengubah status individu lajang yang datang dari luar semiosfer menjadi sebuah identitas pasangan terikat sesampainya mereka di dalam semiosfer. Keseluruhan tatanan ritual ini beroperasi sebagai sebuah *teks sekunder* (*secondary modeling system*) sebuah mekanisme sosiolinguistik di mana tindakan perabaan dan bahasa gerak keseharian disublimasi menjadi bahasa teatrikal-puitis. Tujuan akhir dari ekosistem semiosferik ini adalah untuk memproduksi ulang kode genetika kebudayaan, mentransmisikan pengetahuan lokal lintas dimensi mengenai pembagian peran (*gender roles*), dan memahat arsitektur ingatan kolektif yang tak terhapuskan mengenai bagaimana sebuah institusi keluarga Bugis yang paripurna harus didirikan dan dipertahankan.

4.3 Perspektif Etnopedagogi: Institusionalisasi Nilai *Siri' na Pacce* dan Pendidikan Lintas Budaya

Dalam diskursus keilmuan etnopedagogi kontemporer, praktik-praktik pendidikan (*pedagogical practices*) diyakini tidak pernah terbatas dan terkurung di dalam dinding-dinding kaku ruang kelas pendidikan formal institusional. Etnopedagogi merestorasi keyakinan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan *indigenous* yang dikemas dalam bentuk tradisi tutur lisan, ritus-ritus siklus daur hidup (*life cycle rituals*), dan pranata institusi adat merupakan bentuk instrumen pedagogi budaya yang paling efisien. Efisiensi ini bermuara pada fakta bahwa ritual tidak memaparkan teori, melainkan memaksa partisipannya untuk mengalami secara langsung (*experiential learning*), memantik keterlibatan emosional-psikologis, dan dibingkai oleh mekanisme *reward and punishment* berupa sanksi moralitas sosial. Dalam orbit pemikiran inilah, *Mappasikarawa* mentransformasikan dirinya menjadi medium pendidikan informal yang sangat masif; sebuah sarana rekayasa sosiokultural untuk membentuk karakter moralitas masyarakat (*character building*) Bugis-Makassar yang berpusat pada episentrum falsafah hidup *Siri' na Pacce*.

Secara konseptual-epistemologis, *siri'* merepresentasikan sebuah hibrida emosional yang mencakup harga diri personal, kehormatan keluarga, martabat komunal, rasa malu yang konstruktif, serta reputasi silsilah. Sementara itu, padanannya yakni *pacce* (atau dalam dialek tertentu disebut *pesse'*), melambangkan kedalaman kepekaan batin, tingkat kecerdasan empati sosial, rasa bela rasa empati yang akut, dan dorongan solidaritas untuk menanggung kepedihan penderitaan sesama anggota warga. Kedua variabel nilai yang menjadi napas kehidupan *To Ugi* (Manusia Bugis) ini saling berjalın-kelindan dan dioperasionalkan secara bersamaan dengan trinitas etika lainnya, yakni nilai *lempu'* (kejujuran absolut, integritas tanpa kompromi), *getteng* (keteguhan esensial dalam memegang prinsip kebenaran ontologis dan menepati janji yang terucap), serta dialektika *sipakatau* dan *sipakalebbi* (prinsip egaliterisme total dalam

memanusiakan sesama manusia secara setara dan memuliakan posisi mereka tanpa stratifikasi bias).

Melalui wahana empiris ritual *Mappasikarawa*, beban moralitas, beban eksistensi, dan abstraksi *siri'* ditransmisikan serta dioperasikan secara visual dan kinetik. Pada detik yang presisi ketika mempelai pria mendaratkan sentuhan kulit pertamanya ke tubuh sang istri dengan disaksikan oleh legitimasi tatapan mata *pappasikarawa* dan keluarga, terjadilah sebuah peristiwa transferensi kosmologis berskala besar. Segala otoritas pembelaan, jaminan logistik, dan tanggung jawab historis untuk menjaga maruah serta *siri'* (kehormatan dan tubuh) perempuan tersebut, yang selama dua atau tiga dekade sebelumnya bersandar secara eksklusif dan monopolistik di pundak ayah biologis dan saudara laki-lakinya (sebagai *wali* nasab), secara resmi dan definitif diserahkan dan berpindah ke pundak sang suami. Sentuhan ibu jari, pelipis, atau dahi tersebut pada hakikatnya adalah penandatanganan akta serah-terima tanggung jawab agung kemanusiaan tanpa menggunakan pena dan kertas. Melalui sentuhan itu, alam bawah sadar suami didoktrin dan dididik seketika bahwa entitas tubuh dan konstelasi jiwa perempuan yang baru saja disentuhnya itu tidak lagi berstatus "Lian" (Orang Lain), melainkan telah melebur menjadi personifikasi representasi mutlak dari *siri'* (harga diri) dirinya sendiri. Konsekuensi logis dari doktrin ini adalah: tindakan menyakiti, mengkhianati, atau menelantarkan sang istri secara otomatis berimplikasi pada penghancuran harga diri, dekonstruksi martabat, dan obliterasi eksistensinya sendiri sebagai seorang laki-laki Bugis sejati di mata semesta sosial.

Di sayap yang lain, operasionalisasi konsep *pacce* diajarkan dan disimulasikan melalui orkestrasi skala makro dalam pelaksanaan ritual ini yang secara deterministik menuntut kolaborasi, sinkronisasi, dan kekompakan masif dari dua klan keluarga besar (*sompe'*). Kerelaan dan kesediaan keluarga pihak laki-laki untuk menyelenggarakan prosesi pernikahan dengan mengacu pada standar tinggi kompilasi adat yang ketat, mengumpulkan prasyarat materi (seperti *uang panai'*), dan ketertundukan mereka secara absolut pada tuntunan hierarkis sang *pappasikarawa*, sejatinya merupakan ejawantah wujud empati komunal untuk bersama-sama menjaga reputasi dan maruah (*siri'*) keluarga pihak perempuan di hadapan publik komunal.

Sebagai cetak biru model pendidikan karakter yang adaptif di era modernisasi, dekonstruksi makna *Mappasikarawa* terbukti menjadi landasan pijak yang luar biasa kuat bagi implementasi pendidikan lintas budaya (*cross-cultural education*) atau literasi multikultural. Sebagaimana yang diartikulasikan secara bernas oleh Rahim dan Yusuf (2023) dalam tinjauan riset etnopedagogis terapan di berbagai simpul kawasan Timur Indonesia, tradisi ini memancarkan secara konstan nilai-nilai universal berupa kesopanan, ajaran toleransi, tata cara penghormatan terhadap batasan ruang personal (*personal boundaries*), serta penghargaan intrinsik terhadap keberagaman identitas, yang kesemuanya merupakan *soft-skills* krusial yang wajib diajarkan secara kontekstual kepada tatanan generasi penerus. Ritual purba ini mendemonstrasikan secara gamblang, empiris, dan praksis bahwa resolusi konflik dan kedamaian koeksistensi lebih berpeluang terwujud melalui kapabilitas kelenturan kompromi kultural dan penekanan ego rasional (yang disimbolkan secara cemerlang oleh kelembasan otot persendian ibu jari dalam sentuhan), dibandingkan melalui metodologi dominasi satu arah, hegemoni buta, atau agresi kekerasan. Melalui pendekatan pedagogis dan pembelajaran kontekstual yang berakar pada kearifan lokal semacam ini, para pemuda yang berpapasan langsung dengan ritual ini akan distimulasi untuk merekayasa dan mengembangkan horizon kesadaran multikulturalisme komprehensif, yang pada akhirnya akan mendongkrak ketahanan dan keharmonisan bermasyarakat dalam konfigurasi negara-bangsa yang kian plural, cair, dan terfragmentasi.

4.4 Dialektika Hukum Islam dan Sinkretisasi Tradisi Kontemporer ('*Urf* dan *Maqashid Al-Syariah*)

Aspek krusial berikutnya yang tidak memiliki celah untuk direduksi apalagi dipisahkan dari analisis makro fenomena kultural manusia Sulawesi Selatan adalah kuatnya fusi, sinkretisasi, dan proses peleburan organik antara arsitektur kebudayaan adat prasejarah dengan doktrin epistemologi teologi Islam. Masyarakat Bugis-Makassar selama berabad-abad mengkalibrasi hidup mereka dengan berpegang teguh pada imperatif adagium aksiologis: "*Ade' assituruseng, sara' assituruseng*" dan prinsip universal Nusantara "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*". Meskipun ditinjau dari silsilah genealogi dan historiografi kebudayaan, eksistensi *Mappasikarawa* murni merupakan produk artifisial dan ciptaan rekayasa kultural peninggalan leluhur era pra-Islam (yang bernuansa mistisisme, animisme, dan dinamisme awal pada era mitologi I La Galigo), tradisi ini telah berhasil melakukan evolusi dan metamorfosa.¹³ Ia telah melewati proses dialektika asimilasi resiprokal, modifikasi esensial, dan purifikasi ontologis yang sedemikian panjang sehingga mampu berinkulturasi secara halus, damai, dan nir-konflik dengan parameter kemutlakan sistem nilai hukum Islam paska Islamisasi Kerajaan kembar Tellumpoccoe di Sulawesi Selatan.

Dalam diskursus yang ketat pada kerangka yurisprudensi fikih (*Islamic jurisprudence*), validitas fungsionalitas tradisi komunal ini pada mulanya sering menjadi pusaran perdebatan akademis antara para puritan yang ingin mereduksinya sebagai kategori bidah atau *khurafat* yang koruptif, dengan para akomodasionis yang merawatnya sebagai instrumen identitas kebangsaan yang berterima. Akan tetapi, telaah kritis dan dekonstruksi analisis dari mayoritas konklusi pakar perbandingan hukum keluarga Islam kontemporer telah sepakat menempatkan kedudukan ritual *Mappasikarawa* sebagai suatu perwujudan presisi dari kaidah usul fikih '*urf shahih*' (yakni entitas kebiasaan lokal dan preseden masyarakat yang secara etis baik, memiliki nilai pragmatisme rasional, serta dapat dibenarkan untuk ber hukum oleh otoritas syariat). Legitimasi yuridis, kultural, dan teologis atas status '*urf shahih*' ini didasarkan secara logis pada parameter ontologis ketat bahwa sisa-sisa pelaksanaan ritual ini pada era kontemporer telah dieliminasi dan dibersihkan sepenuhnya dari segala bentuk anasir *kemusyrikan* (politeisme) fatal yang berlawanan dan bertentangan dengan kemurnian rasionalisme tauhid. Sebagai wujud purifikasi revolusioner, kompilasi doa-doa mitologis dan pembacaan mantra kuno sinkretis (*baca-baca magis* Bugis) telah disubstitusi dan diisi secara integral dengan perbendaharaan doa permohonan keselamatan universal, vokalisasi salawat Nabi yang syahdu, zikir basmalah, serta penyematan lafaz-lafaz puitis dari ayat suci Al-Qur'an. Operasionalisasi dan instrumentasi penggunaan terminologi samawi, seperti pendarasan potongan surah Ali Imran dan repetisi konstan atas doa munajat yang memohon pelipatgandaan keberkahan absolut (*Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fii khair*), bertransformasi menjadi agen mediasi spiritual yang melegalkan interaksi penyatuan dimensi biologis tersebut. Ritual fisik lantas terkonversi secara gemilang, memperoleh kemuliaan paripurna baik di bawah tatapan pengadilan syariah agama maupun di hadapan tribunal moralitas hukum adat secara serentak dan koeksisten.

Bergerak pada lapisan penelaahan filosofis yang jauh lebih esoterik dan mendalam, dijumpai fakta bahwa konstruksi anatomi tradisi *Mappasikarawa* ternyata memancarkan harmoni dan memiliki frekuensi resonansi intrinsik yang berkesesuaian tinggi dengan spektrum *Maqashid Al-Syariah* (teori yang mempelajari tujuan rasional tertinggi, muara kemaslahatan, dan hikmah di balik legalitas hukum Islam itu sendiri). Secara lebih spesifik, korelasi ini berjalın-kelindan dengan sangat kokoh dalam perwujudan perlindungan aspek primer *hifz an-nasl* (sistem proteksi mutlak terhadap penjagaan, kontinuitas genealogis, kesucian, dan kelangsungan nasab

keturunan generasional umat manusia) dan *hifz an-nafs* (sistem proteksi total terhadap keselamatan jiwa, kehormatan fisik, dan harkat martabat kemanusiaan itu sendiri).³⁰ Muara objektif dari sistem periodisasi sentuhan ritual yang memfokuskan resonansi afirmasi dan melangitkan doa dengan tendensi pada eskatologi keselamatan organ reproduksi (*nasl*), garansi pencapaian kedamaian serta stabilitas ekuilibrium hati, eufonia perpanjangan rentang umur produktif pasutri, serta pembongkaran dinding pembatas yang menyekat keintiman agar tercipta keterikatan benang kasih sayang organik (*sakinah mawaddah warahmah*) pada hakikatnya bertindak secara proaktif, preskriptif, maupun preventif. Mekanisme ini berfungsi layaknya imunitas (*firewall*) budaya untuk meminimalisasi eskalasi disharmoni struktural di dalam sel sel keluarga, serta secara empiris bertujuan menekan persentase peluang terjadinya tragedi disolusi dan dekonstruksi pernikahan (yakni momok perceraian) yang esensinya sangat dimakruhkan dan dibenci oleh konstitusi agama. Praktik kultural ini dengan sendirinya tampil merepresentasikan keelokan, kebijaksanaan, serta kemilau wajah pluralitas Islam Nusantara yang inklusif di wilayah jazirah peradaban Sulawesi. Konsepsi penyebaran keyakinan ini menyajikan konklusi rasional bahwa agama semawi hadir merapat ke ranah budaya bukan dengan intensi tiranik untuk merepresi, membongkar secara anarkis, apalagi merubuhkan fondasi-fondasi konstruksi kebudayaan vernakular yang telah tertancap sejak dulu kala. Sebaliknya, agama merapat untuk mengkalibrasi, memodulasi, menyaring, serta membingkai ulang kearifan-kearifan murni tersebut agar sesuai dengan kaidah-kaidah kepantasan moral, eskatologi, dan tuntunan teologis langit. Strategi alkimia semacam ini memungkinkan penegakan hukum ketuhanan di muka bumi dapat terealisasi secara damai dan sempurna tanpa harus menceraabut, memvakumkan, atau memutilasi elemen identitas lokalitik historis yang mendefinisikan eksistensi kebanggaan komunal masyarakat penganutnya.

4.5 Ketahanan Budaya (*Cultural Resilience*) dan Reartikulasi Identitas Kolektif di Era Modernisasi Digital

Invasi modernisasi, yang senantiasa diakselerasi secara eksponensial oleh revolusi konvergensi teknologi perangkat digital terpadu, hegemoni kapitalisme industri, interkoneksi globalisasi aliran komoditas dan informasi, serta pergeseran orientasi gaya hidup urbanistik (yang kini sepenuhnya didominasi oleh literasi visual *generasi Z* serta *Generasi Alpha* yang tumbuh bersama layar komputasi), telah memantik turbulensi masif dalam peta peradaban kontemporer. Disrupsi masif dari kebudayaan populer eksternal dan meluasnya pragmatisme ideologi materialistis seringkali mengambil peranan antagonis dengan mendelegitimasi, menggerus, serta menggeser posisi nilai kedalaman kontemplasi kerohanian dan muatan spiritual dalam suatu pelaksanaan tradisi ritual purba. Ritual yang mulanya berdiri agung sebagai kanon spiritual masyarakat komunal, kini perlahan-lahan disulap dan direndahkan kastanya untuk beralih fungsi menjadi tidak lebih dari sekadar komoditas eksotis, properti latar (*backdrop*) fotografi estetik, atau bahan tontonan performatif yang memanjakan ilusi ketenaran virtual di berbagai platform algoritma media sosial raksasa. Desakan diktator algoritma berbasis *attention economy* (*ekonomi atensi*) ini secara terstruktur telah menjerumuskan banyak artefak ritual dan praktik lokal tradisional pada jurang tragedi *komodifikasi* akut, di mana substansi makna esoteris dan konteks keluhuran kerangka filosofis pedagogisnya justru dieliminasi, disortir, dan secara artifisial terkikis habis. Alhasil, yang tertinggal dan diwariskan hanyalah fragmen cangkang kulit luarnya (imitasi fisik) yang kemudian direproduksi dan diduplikasi secara banal, superfisial, dan terfragmentasi murni semata-mata untuk memfasilitasi kebutuhan pasokan konsumsi instan industri hiburan dan tontonan (*spectacle society*) para audiens nir-makna.

Kendati berada dalam ancaman gempuran tsunami globalisasi yang tanpa kompromi tersebut dan berada pada pusaran krisis identitas, masyarakat etnis Bugis-Makassar nyatanya tampil mendemonstrasikan sebuah anomali dan kapasitas penolakan (*defense mechanism*) berupa ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang memiliki skala daya lenting sangat luar biasa di atas

rata-rata entitas suku Nusantara lainnya. Realitas empiris dari eksistensi, persistensi, dan keberlanjutan praktik fenomena *Mappasikarawa* secara konsisten dan repetitif di tengah hiruk-pikuk kehidupan era modern menyuguhkan demonstrasi sah yang membantah tesis kepunahan budaya. Fenomena tersebut sekaligus merupakan pembuktian aksiologis bahwa bangunan fondasi kompilasi kebudayaan Bugis pada hakikatnya bukanlah sekadar tumpukan artefak pasif, manuskrip lapuk yang statis, atau reliqui membatu yang sengaja dibekukan secara artifisial di dalam kapsul etalase ruang pameran museum sejarah dan diisolasi dari denyut nadi realitas. Sebaliknya, kebudayaan tersebut memanifestasikan eksistensinya sebagai sebuah format organisme sibernetik *survivalis* yang senantiasa bernapas, bermetabolisme, sangat lentur mengompromikan bentuk, memiliki sensitivitas memori adaptasi luar biasa, dan berevolusi dengan gesit.⁵ Berdasarkan temuan deduktif melalui metode dekode analisis fenomenologis terhadap variabilitas manifestasi pelaksanaan ritus suci *Mappasikarawa* versi kontemporer—yang pelaksanaannya tak terbatas pada benteng sentrum demografi Sulawesi Selatan semata, tetapi telah mewabah serta menggema di kawasan urban aspal perkotaan metropolitan padat, bahkan merajut kokoh sabuk peradaban di simpul-simpul teritorial koloni eksternal diaspora di zona *frontier* luar episentrum Sulawesi (sebagaimana dipetakan oleh observasi sebaran spasial kultural di Pulau Sebatik, perbatasan Nunukan, koloni Morowali Utara yang ditandai hegemoni tambang, maupun lanskap sosiologis maritim di pesisir Pagatan serta tanah rantau strategis komersial Nusantara lainnya)—diperoleh sintesis bahwa tradisi esensial ini sama sekali tidak pernah ditinggalkan, dianulir, atau dianulir legitimasi pelaksanaannya di hadapan penghulu modern. Justru, bertolak belakang dengan hipotesis peleburan identitas di dalam kualifikasi homogenisasi sosiologis leburan (*melting pot*) dinamika kehidupan kota metropolis hiper-modern yang dikendalikan roda kapitalisme, ritus sentuhan *Mappasikarawa* secara ironis justru dipompa dan mengemuka bangkit sebagai monumen perlawanan filosofis (*site of resistance*) kolektif yang tak tertembus.⁵ Ritus yang sakral ini difungsikan laksana instrumen kalibrasi ulang (*re-calibration*) untuk mengafirmasi, mendeklarasikan secara terbuka, serta memproklamasikan kembali perihal autentikasi identitas kemurnian silsilah mereka. Fenomena ini menjadi mekanisme psiko-sosiologis esensial yang bertindak mengunci, mengokohkan, sekaligus memelihara keberlanjutan stabilitas akar silsilah kebudayaan luhur, jejaring historis, dan tali pusar genealogis (*cultural root and genealogical tethering*) bagi para individu kaum urban diaspora agar mereka tidak sepenuhnya larut, luntur, memudar, tergerus, atau bahkan mengalami amnesia kultural dan teralienasi dari esensi ontologis nenek moyangnya di tanah rantau yang tidak mengakar.

Adaptasi rasional perhelatan *Mappasikarawa* dalam bentang lanskap topografi dimensi visual digital saat ini justru secara paradoks membuka celah pelarian ruang mediatisasi dan amplifikasi jangkauan pancaran kebudayaan ke tingkat yang belum pernah terprediksi sebelumnya. Dokumentasi rekayasa visual dan tata rekam *audiovisual* estetis resolusi tinggi dari perayaan sentuhan agung tradisi magis ini yang bersirkulasi dan menginvasi ruang distribusi jagat platform virtual nyatanya telah sukses mendisrupsi serta melampaui tapal batas eksklusivitas geografi fisik letak kamar semiosfer lokalnya semata. Pola sirkulasi kultural baru tersebut justru memberikan probabilitas logis serta memfasilitasi kemewahan bagi generasi milenial, *generasi Z*, dan pasca-milenial untuk memiliki pangkalan data visual agar dapat merekam, menonton, melakukan observasi retrospeksi, meninjau kembali kepingan warisan, dan menjadikan medium piksel tersebut laksana modul perantara guna mengimitasi serta mempelajari warisan etik esensialnya dengan format yang relevan. Formasi konfigurasi ketahanan benteng stabilitas arsitektur kebudayaan ini terbukti terangkai dan terbentuk dari skema perpaduan presisi *fusi* fungsionalitas sinergis antara tiga dimensi esensial adaptasi media digital kultural. Tiga pilar

tersebut yakni: pertama, *Dimensi Relasional* (kompas regulasi empati yang memandu norma-norma tata krama tata krama relasi dan interaksi etika resiprokal berupa sikap *sipakatau* dan *sipakalebbi* dalam ranah nyata dan siber). Kedua, *Dimensi Konten* (pagar verifikasi keabsahan transmisi visualisasi yang memastikan terjaganya kemurnian orisinalitas niat dan kejujuran naratif falsafah murni *lempu'* agar tidak tereduksi). Dan ketiga, eksistensi *Dimensi Regulasi Mandiri* (*self-regulation mechanism*) dalam wujud di mana terinternalisasinya supremasi sistem nilai harga diri dan pertahanan emosional solidaritas *siri' na pacce* beserta kaidah korektif saling memperingati *sipakainge*.² Keseluruhan konfigurasi berlapis tiga variabel penopang dimensi peradaban ini pada akhirnya bertransformasi melahirkan manifestasi dan mendirikan semacam perisai ekosistem pertahanan berlapis, menciptakan mekanisme imunitas pertahanan struktur neurologis dan benteng psikologis dari probabilitas invasi dekadensi perilaku devian, dekulturisasi, perilaku amoral menyimpang, maupun ancaman kepunahan jati diri historis.

Dengan persistensi determinasi yang tidak bergeming dalam upaya mempertahankan keotentikan kerangka dasar esensi absolut tradisi *Mappasikarawa* di setiap jejak langkah manifestasi momentum sakralisasi perhelatan persandingan pernikahan di tengah dinamika pergerakan evolusi struktur masyarakat modernisasi etnis Bugis kontemporer di era disruptif ini, ritual kultural tersebut telah diakui sedang berada pada fase kebangkitan untuk mendemonstrasikan sebuah revolusi, mengalami transendensi, dan melakukan proses evolusi radikal terhadap kodrat fungsionalitas purbanya. Ia dipastikan tidak lagi stagnan bertengger semata-mata pada batasan horizon definisi normatif sebatas ornamen instrumen formalitas proklamasi pengesahan doktrin seremonial legalitas relasi seksualitas reproduksi tatanan kerangka hukum adat belaka, namun lebih dari sekadar perihal ragawi tersebut, *Mappasikarawa* telah bertransformasi rupa, ber-metamorfosis dan menahbiskan dirinya untuk bermetamorfosis sepenuhnya menjadi sebuah sistem jangkar supremasi literasi transmisi edukasi pedagogi sosial komunal lintas-batas dimensi lintas-budaya universal yang masif. Ketahanan resiliensi persistensi eksistensinya dan laku konsistensi pelestariannya yang membumi tanpa henti merefleksikan, mengonfirmasi, memproyeksikan, serta mengafirmasi dengan bukti-bukti faktual akan berlakunya operasi mekanisme resistensi internal komunal (*internal defense mechanism and organic cultural perpetuation*) masyarakat yang berumur tua namun bermental tangguh yang terprogram sangat ajeg, imun, dinamis dan luar biasa terstruktur kuat. Instrumen ini dikonstruksi presisi guna secara berkesinambungan mendistribusikan aliran impuls-impuls transmisi repetitif memori genetik kebudayaan memori kolektif yang berkelanjutan tak terputus aliran oksigennya tanpa ada kompromi toleransi penghentian eksistensi sejenak, menembus lorong perjalanan lipatan ruang-waktu dan masa (*trans-generational continuation of heritage*). Estafet penanaman investasi modal pedagogi kultural tak kasat mata melalui pemanfaatan dimensi medium ruang sakral observasi indrawi kinetis partisipasi dan interaksi langsung peragaan gestur (*participant observation and immersion*) ini mengunci sebuah garansi sistematis. Di mana di dalam bilik eksperimen kawah candradimuka itulah, representasi entitas elemen figur generasi pewaris pelanjut nasab, penerus obor tradisi, serta agen-agen penerus estafet tampuk peradaban akan memperoleh privilese untuk berhadapan langsung (*face-to-face contact*), memetakan gerak, melihat demonstrasi praksis visual, mengimitasi dengan segenap saraf motorik, mengadopsi tatanan norma adab, dan kemudian melakukan konstruksi penafsiran mandiri untuk memaknai kembali kemurnian bongkahan warisan mutiara hikmah tersebut. Warisan epistemologis keilmuan purba berupa laku pengaplikasian nilai kearifan kelenturan ego kompromi resolusi resolusi konflik rekonsiliasi sentuhan kultural itu akan diagungkan secara konkrit, diinternalisasi dan selanjutnya diproyeksikan ke level yang paling krusial yakni difungsikan sebagai serpihan fondasi peletak batu pertama untuk turut menunjang dan berkontribusi mengakselerasi bangunan megah fondasi pilar arsitektur mozaik multikulturalisme harmoni peradaban kebangsaan Indonesia yang pluralistik yang sejati, mendalam, setara dan paripurna otentik tanpa perlu mengorbankan setetes pun kemurnian dari jatidiri DNA lokalitas historis asal-muasal muaranya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Mappasikarawa bukan sekadar ritual seremonial dalam pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan, melainkan sebuah sistem komunikasi simbolik yang holistik. Melalui gestur sentuhan pertama, urutan ritual, dan ruang semiosfer kamar pengantin, tradisi ini mentransmisikan nilai-nilai adat inti seperti *siri' na pacce*, *lempu'*, *getteng*, serta prinsip *sipakatau* dan *sipakalebbi*. Dengan mengintegrasikan semiotika budaya (Peirce dan Lotman), interaksionisme simbolik (Mead), serta perspektif etnopedagogi, penelitian ini membuktikan bahwa Mappasikarawa berfungsi sebagai medium pendidikan informal yang efektif membentuk identitas kolektif, karakter moral, dan ketahanan budaya (*cultural resilience*) di tengah arus modernisasi dan digitalisasi.

Secara spesifik, penelitian ini menjawab ketiga rumusan masalah yang diajukan. Pertama, anatomi ritual Mappasikarawa terdiri atas fase-fase performatif yang terstruktur (pembukaan pintu, sentuhan simbolik, Malloangeng, dan sungkeman) yang membentuk sistem gestur kohesif. Kedua, analisis semiotika mengungkap makna filosofis setiap lokus sentuhan dari ibu jari (tafahum dan peredaman ego) hingga dahi (spiritualitas dan akal budi) serta operasi semiosfer yang memisahkan ruang sakral dari dunia profan. Ketiga, nilai-nilai adat tersebut berperan sebagai instrumen etnopedagogi yang mentransmisikan pendidikan lintas budaya, memperkuat sinkretisasi dengan hukum Islam melalui konsep '*urf shahih* dan *maqashid al-syariah*, serta membangun ketahanan budaya yang adaptif di era globalisasi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam hanya dilakukan di beberapa lokasi utama (Bone, Soppeng, Morowali Utara, dan diaspora Sebatik), sehingga generalisasi masih terbatas pada konteks Bugis-Makassar. Selain itu, analisis semiotika bersifat interpretatif-emik dan belum melibatkan pengukuran kuantitatif dampak ritual terhadap generasi muda secara luas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut yang bersifat komparatif antarwilayah diaspora Bugis-Makassar serta studi longitudinal untuk mengukur efektivitas Mappasikarawa sebagai instrumen pendidikan multikultural di era digital. Dengan demikian, tradisi luhur ini dapat terus direvitalisasi sebagai warisan takbenda yang memperkuat jati diri bangsa tanpa kehilangan esensi filosofisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahida, R., Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., Sesmiarni, Z., Puteri, H. E., Hendri, N., & Izmuddin, I. (2025). *Dialektika Keilmuan dalam Pendekatan Lokalitas dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arifin, I. (2025). Mappatabe sebagai Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Sulawesi Selatan. *Edusos: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 2(01), 1–5.
- Kusno, A., Darmawan, A., Ramadhan, A. S., Kurniawan, A., Arahmaiani, Yunanto, A., Ash Shiddiq, A., Darman, D., Wardani, F., Hardiman, F. B., Harsono, F. X., Hafiz, Budiman, H., Farid, H., Karyanto, I., Ameng, I., Irwansyah, J., Rahman, L., Andan, M., ... Murti, Y. F. K. (2012). *SIASAT: Seni Rupa dan Budaya Kontemporer di Indonesia* (Hafiz & R. Agustinus (eds.)). Yayasan ruangrupa.
- Saetban, A., & Waang, M. (2019). PRANATA PENDIDIKAN DALAM LATAR BUDAYA DAN ORGANISASI. *E-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 90–99.

- Swastiwi, A. W. (2024). *Globalisasi dan media: Konvergensi budaya dan komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Wahyudi, I., & Demang, K. (2025). Restorasi Makna Tradisi di Tengah Modernitas dan Digitalisasi. *RRINews Malang*. <https://rri.co.id/>
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2023). AI Dalam Komunikasi Smart City: Transformasi Komunikasi Masyarakat Dengan Pemerintah Di Era Digital. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi*.